

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA GENTENG KULON

Mh. Rafly Oktavianto¹, Itok Wicaksono²

^{1,2)} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: raflibwi1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa dalam memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan koperasi desa sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal yang berlandaskan partisipasi masyarakat dalam konteks pelaksanaan otonomi desa. Dalam hal ini, pemerintah desa menempati posisi yang strategis sebagai aktor kunci dalam menjamin keberlanjutan koperasi melalui fungsi penginisiasian, fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan yang terdiri atas aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta anggota masyarakat. Proses analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Genteng Kulon telah menjalankan peran yang aktif dalam penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih, antara lain melalui penataan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan norma dan aturan kelembagaan, pengembangan relasi antaraktor, serta pembangunan legitimasi sosial koperasi di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat, baik dalam keanggotaan koperasi, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, maupun partisipasi dalam aktivitas usaha koperasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif agar koperasi desa mampu berfungsi secara optimal sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Penguatan Kelembagaan, Koperasi Merah Putih, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This study aims to examine the role of the Village Government in strengthening the institutional capacity of the Merah Putih Cooperative as an effort to enhance community participation in Genteng Kulon Village, Genteng District, Banyuwangi Regency. This study is motivated by the importance of village cooperatives as instruments for local economic development based on community participation within the framework of village autonomy. In this context, the village government occupies a strategic position as a key actor in ensuring the sustainability of cooperatives through functions of initiation, facilitation, guidance, and institutional supervision. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving informants consisting of village government officials, cooperative management, and community members. Data analysis was conducted using the interactive model proposed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Genteng Kulon Village Government has played an active role in strengthening the institutional capacity of the Merah Putih Cooperative through organizational structuring, enhancement of human resource capacity, reinforcement of institutional norms and regulations, development of inter-actor relations, and the establishment of social legitimacy within the community. These roles have contributed to increased community participation, both in cooperative membership, involvement in decision-making processes, and participation in cooperative business activities. Nevertheless, this study also identifies several constraints, including limited human resource

capacity and uneven public understanding of the functions and roles of cooperatives. Therefore, sustainable, participatory, and adaptive institutional strengthening efforts are required to enable village cooperatives to function optimally as pillars of the people's economy.

Keywords: Role of Village Government, Institutional Strengthening, Merah Putih Cooperative, Community Participation

PENDAHULUAN

Era pasca-reformasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pembangunan desa, mengubah pemerintahan desa dari sekadar pelaksana arahan tingkat atas menjadi agen penting dalam tata kelola dan pembangunan lokal. Desa kini memainkan peran sentral dalam mengelola inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unik masyarakatnya. Transisi ini menempatkan desa sebagai unit pemerintahan strategis yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif warga dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Sebagai wujud implementasi kebijakan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Desa didorong menjadi pusat penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Dalam konteks ini, pemerintah desa memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal.

Pemerintahan desa memiliki dua peran kunci dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan mengelola pemerintahan. Selain menjalankan tugas administratif, pemerintahan desa juga harus berperan sebagai katalisator transformasi sosial dan ekonomi dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya konstruktif. Pembentukan organisasi ekonomi desa seperti koperasi, yang menyediakan platform bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi secara demokratis dan berkelanjutan, merupakan salah satu contoh nyata dari fungsi ini. Pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memulai, menjalankan, dan mengawasi koperasi untuk memastikan koperasi tersebut mengikuti prinsip-prinsip ekonomi rakyat.

Sebagai organisasi ekonomi yang didirikan berdasarkan nilai-nilai keluarga, kolaborasi, dan demokrasi ekonomi, koperasi desa sangat penting. Koperasi merupakan komponen vital dalam memperkuat ekonomi lokal karena menyediakan forum bagi masyarakat untuk berkolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Koperasi meningkatkan akses masyarakat terhadap uang tunai, mengembangkan jaringan usaha mikro dan kecil, serta mendorong pembelajaran sosial yang memperkuat ikatan antar warga setempat. Keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai mentor dan fasilitator sangat penting bagi efektivitas koperasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan koperasi, kepemimpinan desa yang visioner dan partisipatif dapat memperkuat rasa kepemilikan atas lembaga ekonomi bersama ini.

Kabupaten Banyuwangi, salah satu wilayah di Jawa Timur, dikenal berhasil menerapkan otonomi daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten ini melaksanakan berbagai inovasi untuk memperkuat ekonomi rakyat, salah satunya melalui pendirian Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi desa yang inklusif dan menekankan kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan program nasional penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM yang dicanangkan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi (Alflahul, 2025). Inpres No. 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sekaligus memperkuat peran pemerintah desa sebagai fasilitator pengembangan ekonomi lokal. Sampai tahun 2025, telah terbentuk 217 Koperasi Merah Putih yang tersebar di berbagai desa di Banyuwangi, berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus sarana pembelajaran masyarakat dalam manajemen usaha, pendampingan kelembagaan, dan penguatan nilai gotong royong.

Salah satu desa yang aktif mengembangkan Koperasi Merah Putih adalah Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan dokumentasi desa (Peraturan Desa Genteng Kulon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), koperasi ini dibentuk sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM berbasis desa. Desa Genteng Kulon memiliki jumlah penduduk sekitar 19.435 jiwa dengan potensi ekonomi

yang besar, terutama melalui aktivitas perdagangan di pasar desa dan dua pusat perbelanjaan modern yang menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat (Prasetyo, 2023). Kondisi ini menjadikan Genteng Kulon sebagai desa dengan potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan model pemberdayaan masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Desa Genteng Kulon menunjukkan berbagai dinamika. Terlepas dari keterlibatan pemerintah desa dalam pendirian dan pengelolaan koperasi, terdapat perbedaan dalam pemahaman masyarakat tentang peran koperasi sebagai entitas ekonomi bersama. Selain itu, terdapat variasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat dalam operasional koperasi di setiap tahapan, termasuk pemantauan kelembagaan, pelaksanaan bisnis, dan perencanaan. Contoh ini menggambarkan bagaimana gagasan koperasi sebagai organisasi ekonomi partisipatif berbeda dari pola keterlibatan masyarakat yang sebenarnya.

Insiden ini menunjukkan betapa sulitnya memperkuat struktur koperasi di tingkat lokal. Penting untuk mempertimbangkan koneksi kelembagaan, kapasitas aktor, dan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat ketika menganalisis peran pemerintah desa dalam mendukung dan membimbing koperasi. Perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat berdampak pada jenis dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan koperasi, yang mengarah pada berbagai pola partisipasi. Akibatnya, peristiwa ini menciptakan peluang studi untuk memahami bagaimana lembaga Koperasi Merah Putih diperkuat oleh pemerintah desa dan bagaimana dinamika keterlibatan masyarakat dihasilkan dalam konteks ini..

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Di Desa Genteng Kulon, serta sejauh mana peran tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi bersama. Penelitian ini diharapkan pula dapat mengungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dan koperasi, sekaligus merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang tepat dan berkelanjutan guna mendorong terwujudnya desa yang mandiri, produktif, serta memiliki daya saing yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh, kemudian menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa sesuai konteks alami dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah (Moleong, 2010). Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif merupakan proses ilmiah untuk memahami persoalan manusia dalam lingkungan sosialnya dengan menyajikan gambaran yang utuh dan kompleks, menampilkan pandangan mendalam dari informan, serta dilakukan dalam situasi alami tanpa intervensi peneliti.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu informasi dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena sebagaimana adanya di lapangan. Karena itu, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan serta perilaku yang dapat diamati (Mulyadi, 2012). Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara sistematis, akurat, dan faktual, sehingga seluruh informasi yang disampaikan mencerminkan kondisi nyata berdasarkan fakta terbaru yang bersifat konkret dan alami. Pendekatan ini dipilih karena karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan penelitian dan topik yang dikaji yakni Peran Pemerintah Desa Dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Genteng Kulon.

Sumber Data

Secara sederhana, sumber data merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab kebutuhan data serta pertanyaan terkait topik penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, sumber data dapat berupa uraian kata-kata, deskripsi kalimat, maupun gambaran tindakan (Moleong, 2010). Selain itu, terdapat pula data pendukung seperti catatan resmi, laporan, dokumentasi, dan berbagai bahan lain yang dianggap relevan dengan penelitian untuk menyelesaikan studi ini, sebagai berikut :

Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pihak yang terkait tanpa melalui perantara (Umar, 2002). Untuk mendapatkan data primer, peneliti perlu melakukan pengumpulan data secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara. Dengan demikian, pada

penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan sesuai kondisi aktual. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap paling memahami dan memenuhi kriteria pengetahuan mengenai objek penelitian. Informasi dari para informan tersebut menjadi sumber utama dalam studi ini.

Data primer memiliki peran penting karena menjamin keaslian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kualitas dan kelayakan sumber data primer sangat menentukan keaslian data yang digunakan dalam penelitian; semakin banyak dan relevan data yang diperoleh, semakin tajam dan komprehensif hasil penelitian yang dihasilkan.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, laporan, artikel, dan jurnal (Priadana & Sunarsi, 2021). Umumnya, data sekunder berbentuk bukti, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip maupun dokumentasi, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Moleong, 2010). Sumber data sekunder berperan sebagai pelengkap dan penguat data utama penelitian.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sumber data primer, bahwa kata-kata dan tindakan informan menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif. Untuk mendukung proses analisis dan pembahasan, peneliti juga memanfaatkan studi literatur berupa buku, berita faktual, dokumen resmi, serta informasi dari internet. Peneliti dengan mudah dapat menemukan referensi terkait tata kelola kolaboratif karena informasi mengenai topik tersebut tersedia luas dan mudah diakses secara daring. Oleh karena itu, sumber-sumber tersebut dapat dijadikan bagian dari data sekunder yang mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, yang pada dasarnya bersifat abstrak dan tidak berwujud secara fisik, namun dapat diperlihatkan melalui praktik penggunaannya (Arikunto, 2002). Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang valid. Oleh karena itu, metode yang digunakan meliputi:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meminta informasi secara langsung melalui serangkaian pertanyaan kepada informan. Moleong (2010) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan telah disusun sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mencatat dan mengamati secara sistematis fenomena yang muncul pada objek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti melihat dan merekam langsung berbagai peristiwa maupun perilaku di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, observasi menjadi salah satu cara penting untuk memahami kondisi lingkungan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang nyata, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.

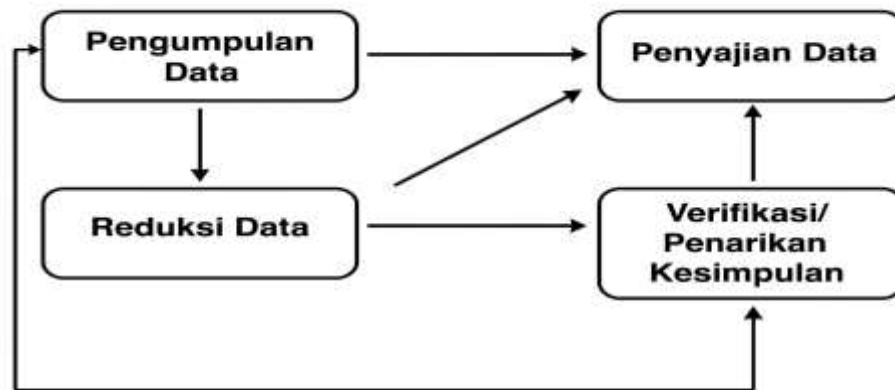
3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, maupun karya-karya resmi dari individu atau lembaga. Dalam penerapannya, peneliti menelaah berbagai sumber seperti buku, dokumen, majalah, peraturan, notulen rapat, serta catatan lainnya (Arikunto, 2002). Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang tidak dapat dijangkau melalui wawancara atau observasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan fenomena yang diteliti.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses mengumpulkan, menyederhanakan, dan memadatkan data agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian serta disajikan dalam format yang mudah dipahami. Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa secara cermat agar valid dan akurat. Setelah data lapangan dikumpulkan, peneliti menyusun kesimpulan sehingga informasi tersebut dapat dimengerti oleh orang lain maupun peneliti sendiri. Penelitian ini

menggunakan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang mencakup empat tahap pengolahan data secara skematis:



Gambar Tahap Pengolahan Data oleh Miles And Huberman

a) Pengumpulan Data

Menurut Miles & Huberman (2014), pengumpulan data dilakukan melalui catatan lapangan yang mencatat informasi dari observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Catatan lapangan terdiri dari dua komponen utama, yaitu: Catatan deskripsi, yang berisi data nyata seperti pengamatan, pengalaman, perasaan, dan hal-hal yang didengar oleh peneliti terkait fenomena yang diamati. Catatan refleksi, yang berisi pendapat, interpretasi, dan analisis peneliti terhadap fenomena yang ditemui, serta membantu menyesuaikan langkah penelitian berikutnya. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung hingga laporan selesai. Proses ini membantu menggolongkan, mengkategorikan, mengeliminasi data yang tidak relevan, dan menyusun informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

c) Penyajian Data

Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa penyajian data adalah pengorganisasian informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan. Data dari lapangan dimasukkan ke dalam matriks untuk memudahkan penguasaan, analisis, dan mencegah kesalahan. Peneliti juga mereduksi data kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dipahami.

d) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman (2014), penarikan kesimpulan merupakan proses yang berkesinambungan dan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan melalui refleksi logis peneliti, peninjauan catatan lapangan, diskusi dengan rekan untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, maupun pengujian temuan terhadap data lain. Dengan demikian, makna dari data diuji keaslian, kekokohan, dan relevansinya untuk menjamin validitas. Kesimpulan akhir tidak hanya ditetapkan setelah pengumpulan data selesai, tetapi juga harus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Genteng Kulon menjalankan peran yang signifikan dalam memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih, baik sebagai penggagas, fasilitator, pembina, maupun pengawas. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pembentukan koperasi, pendampingan aspek legalitas dan administrasi, penyediaan sarana pendukung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dukungan ini berdampak pada penguatan struktur organisasi, kejelasan pembagian tugas pengurus, serta peningkatan tata kelola dan transparansi sehingga koperasi menjadi lebih tertata dan berkelanjutan.

Di samping itu, penguatan kelembagaan tampak dari tersusunnya struktur organisasi yang sistematis, keberadaan aturan internal (AD/ART), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, pengurus, dan anggota. Partisipasi masyarakat tercermin dalam keterlibatan pada rapat anggota, keikutsertaan dalam kegiatan usaha, serta pemanfaatan layanan koperasi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kemampuan manajerial dan belum optimalnya pengembangan koperasi secara berkesinambungan.

Pembahasan

Hasil pembahasan ini disusun berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi mengenai peran Pemerintah Desa Genteng Kulon dalam penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengacu pada dimensi penguatan kelembagaan menurut teori Norman Uphoff (1986) serta pendekatan penguatan institusi lokal.

Organizational Strengthening (Penguatan Organisasi)

Penguatan organisasi difokuskan pada pembentukan struktur yang jelas, pembagian tugas, dan sistem kerja yang terkoordinasi antara pemerintah desa dan pengurus koperasi.

Tabel 4. 1 Penguatan Organisasi Koperasi Desa Merah Putih

Aspek Organisasi	Peran Pemerintah Desa	Temuan Lapangan	Dampak Terhadap Partisipasi
Struktur Organisasi	Memfasilitasi Pembentukan dan Pengesahan Kepengurusan	Struktur Pengurus Terbentuk Lengkap dan Diakui Desa	Anggota Merasa Lebih Percaya dan Mau Terlibat
Pembagian Tugas	Memberikan Arahan Tugas Pokok Pengurus	Tugas Pengurus Sudah Terdefinisi Meski Belum Optimal	Partisipasi Meningkat Pada Kegiatan Rutin
Mekanisme Rapat	Mendorong Pelaksanaan RAT dan Musyawarah	Rapat Anggota Berjalan Namun Kehadiran Belum Merata	Anggota Mulai Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan

Penguatan organisasi tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah desa dalam memfasilitasi pembentukan struktur kepengurusan koperasi serta pengaturan mekanisme kerja internal. Adanya struktur yang jelas dan pembagian tugas yang tegas memberikan kepastian kelembagaan, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan di kalangan anggota. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, upaya penguatan tersebut menjadi landasan penting bagi berkembangnya partisipasi masyarakat secara bertahap.

Resource Strengthening (Penguatan Sumber Daya)

Penguatan sumber daya meliputi peningkatan kapasitas SDM dan dukungan modal.

Tabel 4. 2 Penguatan Sumber Daya Koperasi Merah Putih

Jenis Sumber Daya	Bentuk Dukungan Pemerintah Desa	Kondisi Aktual	Implikasi
SDM Pengurus	Pembinaan Dan Pendampingan	Kapasitas Pengurus Masih Beragam	Perlu Peningkatan Pelatihan
Finansial	Fasilitasi Akses Modal Awal	Modal Masih Terbatas	Usaha Koperasi Belum Berkembang Maksimal
Sarana Prasarana	Penyediaan Tempat dan Dukungan Administrasi	Sarana Dasar Tersedia	Operasional Koperasi Dapat Berjalan

Penguatan sumber daya merupakan elemen penting bagi keberlangsungan koperasi. Pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator pada tahap awal, namun keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan permodalan masih menjadi kendala utama. Situasi tersebut berdampak pada

terbatasnya skala usaha koperasi serta tingkat partisipasi anggota, sehingga dibutuhkan upaya penguatan sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Normative Strengthening (Penguatan Norma dan Aturan)

Penguatan normatif diwujudkan melalui penyusunan AD/ART dan aturan operasional.

Tabel 4. 3 Norma Dan Aturan Koperasi Desa Merah Putih

Unsur Normatif	Peran Pemerintah Desa	Implementasi	Dampak
AD/ART	Mendampingi Penyusunan	AD/ART Telah Disahkan	Menjadi Pedoman Bersama
Aturan Keanggotaan	Sosialisasi Prinsip Koperasi	Pemahaman Anggota Bervariasi	Disiplin Anggota Belum Merata
Nilai Gotong Royong	Menanamkan Nilai Kebersamaan	Mulai Tumbuh Kesadaran Kolektif	Loyalitas Anggota Meningkat

Penguatan normatif berperan sebagai dasar pengendali perilaku anggota koperasi. Keberadaan AD/ART memberikan legitimasi terhadap aturan formal, namun proses internalisasi nilai dan norma koperasi masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai gotong royong agar koperasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga tumbuh atas dasar kesadaran kolektif.

Relational Strengthening (Penguatan Relasi)

Relasi sosial menjadi faktor penting dalam partisipasi masyarakat.

Tabel 4. 4 Penguatan Relasi Kelembagaan Koperasi Merah Putih

Relasi	Bentuk Hubungan	Peran Pemerintah Desa	Hasil Penelitian
Pemerintah Desa dan Koperasi	Koordinasi dan Pembinaan	Sebagai Pembina dan Mediator	Hubungan Kelembagaan Harmonis
Koperasi dan Masyarakat	Sosialisasi dan Keanggotaan	Memfasilitasi Pertemuan Warga	Partisipasi Mulai Meningkat
Koperasi dan Pihak Eksternal	Jaringan Dengan Intansi Terkait	Membuka Akses Kemitraan	Peluang Pengembangan Usaha
Koperasi dengan BUMN	Program Kemitraan dan Dukungan Permodalan	Memfasilitasi Akses Program dan Rekomendasi	Akses modal, pelatihan, dan stabilitas usaha meningkat

Penguatan relasi kelembagaan menunjukkan bahwa koperasi tidak berjalan secara mandiri, melainkan sangat bergantung pada jejaring sosial dan institusional yang ada. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung strategis antara koperasi, masyarakat, dan berbagai pihak eksternal. Terbangunnya relasi yang baik dapat memperluas peluang pengembangan usaha sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Legitimasi Sosial

Legitimasi sosial terlihat dari penerimaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama.

Tabel 4. 5 Legitimasi Sosial Koperasi Desa Merah Putih

Indikator Legitimasi	Bentuk Legitimasi	Presepsi Diterima/Tidak Masyarakat	Dampak Pada Masyarakat
Pengakuan Formal	SK Desa dan Regulasi	Koperasi Dianggap Resmi	Kepercayaan Meningkat
Dukungan Tokoh Masyarakat	Keterlibatan Dalam Kegiatan	Masyarakat Lebih Menerima	Partisipasi Lebih Luas
Transparansi Kegiatan	Penyampaian Informasi	Kepercayaan Bertahap Tumbuh	Minat Bergabung Meningkat

Legitimasi sosial merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi desa. Pengakuan formal yang diberikan oleh pemerintah desa diperkuat melalui dukungan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Genteng Kulon berperan aktif dan strategis dalam penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai inisiator, fasilitator, dan pembina. Peran tersebut diwujudkan melalui inisiasi pembentukan koperasi, fasilitasi penyusunan struktur organisasi, pendampingan administrasi, serta penyediaan forum musyawarah sebagai ruang pengambilan keputusan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat.

Penguatan kelembagaan koperasi berlangsung secara komprehensif, mencakup aspek organisasi, sumber daya, normatif, dan relasional. Struktur kepengurusan yang jelas, pembagian tugas yang terorganisir, serta pelaksanaan rapat anggota memperkuat aspek organisasi. Keterlibatan anggota dalam kegiatan dan musyawarah mencerminkan penguatan sumber daya manusia. Internalisasi nilai kebersamaan, gotong royong, dan asas kekeluargaan memperkuat dimensi normatif, sementara terbangunnya kerja sama antara pemerintah desa, pengurus, dan masyarakat menunjukkan penguatan relasional. Keseluruhan aspek ini memperkuat legitimasi sosial koperasi sebagai lembaga ekonomi desa yang diakui masyarakat.

Penguatan kelembagaan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, yang terlihat dari keikutsertaan sebagai anggota, kehadiran dalam rapat, serta keterlibatan dalam kegiatan usaha koperasi. Namun, partisipasi belum sepenuhnya optimal karena aspek pengawasan dan pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh pengurus inti dan pemerintah desa. Keberlanjutan koperasi ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dan pengurus dalam membangun ruang partisipasi yang lebih inklusif dan mendorong transformasi dari pola partisipasi yang bersifat mobilisasi menuju partisipasi yang berbasis kesadaran dan kemandirian masyarakat.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kelembagaan dan tingkat partisipasi anggota. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, persepsi anggota, serta kontribusi koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan secara lebih terukur dan generalisable.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada analisis dampak ekonomi Koperasi Merah Putih terhadap pendapatan, kemandirian usaha, dan kesejahteraan anggota secara longitudinal, sehingga mampu melihat perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kajian komparatif antar desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi variasi praktik penguatan kelembagaan serta menemukan model atau praktik terbaik (*best practices*) peran pemerintah desa dalam memperkuat koperasi. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menutup keterbatasan ruang lingkup, pendekatan, dan kedalaman analisis pada penelitian ini sekaligus memperkaya pengembangan studi mengenai penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alflahul, M. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Desa. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 12(1), 45–58.
- Arief, S., & Haeruddin, H. (2025). Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan Literatur atas Praktik Terbaik dan Tantangan Global. *Al- Buhuts*, 21(4), 217–289.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Arnstein. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Galib, M., Ardasanti, A., Syam, J., & Gunawan, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pembentukan Koperasi Digital. 3(1).
- Lutfiyanti. (2024). PERAN KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL. *Central Publisher*, 2 Nomor 9(2), 7.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK PENGUATAN USAHA SIMPAN PINJAM DI DESA SRANAK. *Journal of Research Applications in Community Services*, 4(c), 101–108.
- Mulyadi, D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Musadad, A., Sulistiyo, H., Hasanuh, N., Suartini, S., Suriamanda, G., Yoga, I., Pardistya, Siregar, S., & Noegraha, Novy, T. (2025). Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Digital: Inisiasi Koperasi Merah Putih Di Cipayung Asri, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. 3(1), 1–7.
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih : Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 287–292.
- Permatasari, R. E. (2025). EKSPLORASI PERSEPSI DAN KESIAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENDIRIAN KOPERASI MERAH PUTIH : STUDI KUALITATIF DI DESA KURAI TAJI, KOTA PARIAMAN. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), 337–346.
- Prasetyo, A. (2023). Potensi Ekonomi Desa Genteng Kulon dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 5(2), 33–47.
- Priadana, K., & Sunarsi, D. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Deepublish.
- Purmiyati, A., & Hidayati, Nur, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD) Anjasmoro Kecamatan Wonosalam melalui Edukasi Digitalisasi dan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Pelita Masyarakat*, 4(1), 3686–3200. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v7i1.15875>
- Raenaldi, A. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro. 1(4), 915–920.
- Rahardjo, B. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial: Kajian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2022). Peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 145–156.
- Saputri, A. R., & Hardiyani, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. 3, 95–106.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soetomo, B. (2019). Peran pemerintah desa dalam pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–58.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umar, H. (2002). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Sekretariat Negara.
- Uphoff, N. (1986). Local institutions and participation for sustainable development. *International Institute for Environment and Development*.